

STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dia Nursadiyah¹, Fernandes Simangunsong^{*1}

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung, Indonesia

*Email: kisankiel@yahoo.co.id

Article Info

Keyword:

Strategy;
Local government;
District Integrated
Administrative
Services;

Abstract:

This study seeks to analyze the strategy of local government in accelerating the implementation of integrated sub-district administration services (PATEN), as well as analyzing the factors supporting and inhibiting local government strategies in accelerating the implementation of PATEN, The theory used is the strategy theory from Shirley which explains that strategy has several determining factors, namely Goals and Objectives, Environment, internal abilities, competencies, strategy makers, and communication. The research method used is descriptive and inductive approach, the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation, the informants are the Regent of Tanah Laut Regency, Chair of the DPRD, Regional Secretary, Assistant Regional 1 Government and People's Welfare, Head of the Regional Development Planning Agency, Head of the Regional Development Planning Agency. Human Resources Development Personnel Agency, Head of Government Division, Head of Sub-Division of Government Administration, Head of Sub-Division of Regional Administration, Pelaihari Sub-District, Takisung Sub-District, Jorong Sub-District, Secretary of Pelaihari Sub-District, Secretary of Takisung Sub-District, Secretary of Jorong Sub-District The results of the study explain that the Regional Government strategy in accelerating the implementation of PATEN in Tanah Laut Regency has been going well but in the process there are still obstacles due to the lack of human resources in terms of quality and quantity and there are still people who do not understand regarding PATEN.

Kata Kunci:

Strategi;
Pemerintahan
Daerah;
Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan

Abstrak: kajian ini berupaya untuk menganalisis strategi Pemerintahan Daerah dalam percepatan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintahan daerah dalam percepatan pelaksanaan PATEN, Teori yang digunakan adalah teori strategi dari Shirley yang menjelaskan bahwa strategi memiliki beberapa faktor penentu yaitu Tujuan dan Sasaran, Lingkungan, kemampuan internal, kompetensi, pembuat strategi, dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, informannya yakni Bupati Kabupaten Tanah Laut, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, Camat Pelaihari, Camat Takisung, Camat Jorong, Sekretaris Camat Pelaihari, Sekretaris Camat Takisung, Sekretaris Camat Jorong. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi Pemerintahan Daerah dalam percepatan pelaksanaan PATEN di Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui kendala dikarenakan adanya sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas serta masih ditemukan masyarakat yang belum memahami mengenai PATEN.

Article History: Received 12-April-2021, Revised 14-July-2022, Accepted: 28-August-2022

PENGANTAR

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Afrijal & Vilzati, 2020; Siregar & Nasution, 2021), dimana penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten/kota (Jacob et al., 2021). Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat yaitu 1) substantif, 2) administratif, dan 3) teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN.

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah terlihat dari kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menyediakan pelayanan public (Noraini, 2021; Ripai, 2019), oleh karena itu, penyelenggaraan PATEN sangat berperan penting dalam kehidupan di masyarakat (Nababan & Nur, 2019). PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan di masyarakat yang berkualitas, mudah, cepat, dan tidak rumit guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Nurrahman et al., 2021).

Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia pada akhir tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan diberbagai aspek salah satunya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat, dimana penyelenggaraan pelayanan publik pun menjadi terhambat dikarenakan harus mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat (Lawelai, 2022). Hal tersebut juga mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik di lingkup pemerintahan pusat maupun di lingkup pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota (Sadat et al., 2021). Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan PATEN di setiap kecamatan yang ada di Indonesia dikarenakan penyelenggaraan pelayanan yang semula dilakukan secara langsung (offline) kemudian berubah menjadi penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan secara tidak langsung (online).

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang ibukotanya terletak di Pelaihari, dimana Kabupaten Tanah Laut memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah sebesar 384.852 hektar dan memiliki 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut tersebut kemudian terbagi menjadi 135 desa dan 5 kelurahan.

Terdapat perbedaan karakteristik antar wilayah kecamatan baik luas wilayah maupun jumlah desa/kelurahan (Junardi et al., 2022). Luas wilayah dari setiap kecamatan berbeda-beda sehingga memiliki pengaruh dalam pemberaian pelayanan termasuk dalam penyiapan Program PATEN di 11 (sebelas) kecamatan baik dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan guna memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi semua masyarakat. Keberadaan pelaksanaan PATEN di 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sudah mulai memenuhi 3 (tiga) syarat penyelenggaraan PATEN namun begitu, masih ditemukan beberapa kendala dalam

pelaksanaan untuk menuju kearah optimal, dimana Pada tahun anggaran 2020, total belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar Rp 1.012.667.017.080 dan dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 910.192.914.815,43 dan belanja langsung sebesar Rp 1.922.859.931.895,43. Total alokasi belanja yang diperuntukkan bagi 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 54.968.038.589,00 yang dirincikan atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 36.161.436.976,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 18.806.601.613,00. Belanja tidak langsung yang diperuntukan bagi setiap kecamatan sudah termasuk belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan) yang diperuntukan bagi semua kelurahan yang ada dalam beberapa wilayah kecamatan. Besaran alokasi anggaran tahun 2020 pada komponen belanja langsung akan berdampak pada pengadaan dan/atau perawatan sarana prasarana yang merupakan salah satu pendukung jalannya pelaksanaan PATEN, dimana Penyelenggaraan PATEN yang sekarang harus sudah mulai beralih menjadi pelayanan online. Bentuk penyelenggaraan PATEN secara online di Kabupaten Tanah Laut dapat kita lihat dari website <https://portal.tanahlautkab.go.id/>.

Website Kabupaten Tanah Laut bisa diakses oleh setiap masyarakat dengan berbagai macam informasi seputar Kabupaten Tanah Laut, dan di dalam menu website tersebut terdapat bagian khusus informasi mengenai setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, namun hasil observasi awal di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan yang terkait informasi internalnya masih belum tersedia atau zero data, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat akan kesulitan mengetahui secara detail mengenai informasi yang ada di kecamatan tersebut. Dengan masih adanya informasi seputar kecamatan yang belum tersedia, hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kemampuan pegawai dan/atau operator yang belum memadai dalam menggunakan teknologi informasi guna penyelenggaraan pelayanan yang sudah berbasis online (Abbas & Sadat, 2020). Oleh karena itu, perlu segera dilakukan percepatan pelaksanaan PATEN agar tidak menjadi penghambat kedepannya dan pelaksana pelayanan dapat menjadi lebih maksimal. Selain itu, masalah lain yang terlihat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut adalah terdapatnya struktur organisasi yang belum terisi jabatannya dikarenakan banyaknya PNS yang ada di kecamatan adalah pegawai yang sudah memasuki usia tidak produktif atau mendekati pensiun tanpa ada kaderisasi dari pihak pemerintah daerah, sehingga terjadilah kondisi kekurangan pegawai di setiap kecamatan, karena kondisi diatas, maka penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Tanah Laut terkesan belum optimal dan perlu disusun strategi yang luar biasa dari pemerintahan daerah untuk menjangkau dan meningkatkan PATEN untuk semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan Data Kualitatif pada penelitian pemerintahan pada umumnya sama dengan teknik pengumpulan data penelitian sosial (Silalahi, 2010). Dalam metode penelitian kualitatif pemerintahan, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, diskusi terfokus (Focus Group Discussion) dan disempurnakan dengan triangulasi”. Dalam pengumpulan data, peneliti harus dapat mengetahui secara pasti dari mana sumber data tersebut berasal. Hal tersebut senada dengan ungkapan dari Simangunsong, bahwa “Data adalah kumpulan data umum dari banyaknya fakta empirik dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian”. Dalam

pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan dilakukan dengan contoh pola kerja sebagai berikut : menetapkan informan penelitian, menetapkan rumah tema penelitian, menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema, menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan, menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan.

Adapun Informan dalam Penelitian ini yaitu :

A. Informan (key person) pada penelitian ini adalah:

1. Bupati Kabupaten Tanah Laut Informan ke 1
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Informan ke 2
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Informan ke 3
4. Asisten Daerah 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Informan ke 4
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Informan ke 5
6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Bagian Pemerintahan Informan ke 7
8. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Informan ke 8
9. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Informan ke 9

B. Informan Stakeholder yaitu:

10. Camat Pelaihari Informan ke 10
11. Camat Takisung Informan ke 11
12. Camat Jorong Informan ke 12
13. Sekretaris Camat Pelaihari Informan ke 13
14. Sekretaris Camat Takisung Informan ke 14
15. Sekretaris Camat Jorong Informan ke 15

HASIL DAN DISKUSI

1. Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Pelaksanaan PATEN

a. Tujuan Dan Sasaran

1) Organizationai Goal

Agar tercapainya keinginan umum tanpa mengenal batasan waktu diperlukan strategi Pemerintahan Daerah dengan melakukan Inovasi pelayanan yang merupakan kunci strategi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat jangka panjang. Dalam berinovasi pun Pemerintahan Daerah harus mampu mengenali dan memahami karakter dari setiap wilayah di Kabupaten Tanah Laut.

2) Organizational Objective

Strategi Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran dengan melakukan evaluasi dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan kepada masyarakat.

b. Lingkungan

1) Interaksi Dengan Lingkungan Makro

Bentuk interaksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah melalui kecamatan dengan melakukan interaksi kepada masyarakat yaitu melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan melakukan sosialisasi terkait inovasi pengaduan berupa aplikasi E-Lapor. Dengan adanya interaksi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pelayanan admibnistrasi terpadu kecamatan. Interaksi dengan lingkungan mikro.

2) Interaksi Dengan Lingkungan Mikro

Bentuk interaksi internal pemerintahan daerah maupun kecamatan yaitu dengan adanya peran pimpinan kepada bawahan dalam memimpin jalannya pemerintahan baik di lingkup pemerintahan daerah maupun kecamatan. Selain itu, interaksi internal yang dilakukan dengan menerapkan sistem kerjasama tim dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan kepada masyarakat.

c. Kemampuan Internal

1) Kemampuan Internal Dalam Kegiatan Terpusat

Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilakukan dikecamatan oleh petugas PATEN dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan kompeten

d. Kompetisi

1) Kompetisi Dalam Merumuskan Strategi

Kompetisi yang diberikan Pemerintahan Daerah kepada kecamatan dalam percepatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan berupa tantangan kepada setiap camat dalam merumuskan strategi dengan berinovasi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

e. Pembuat Strategi

1) Strategi Harus Dibuat Oleh Orang Yang Kompeten Di Bidangnya.

Perumusan strategi oleh pemerintahan daerah merupakan salah satu tugas sekretariat daerah bagian pemerintahan. Dalam perumusan strategi berdasarkan dari hasil evaluasi dan monitoring secara langsung ataupun melalui rapat koordinasi camat yang dilakukan setiap bulannya. Berdasarkan dari rencana yang diusulkan terkait inovasi pelayanan dan tata laksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dirancang untuk mempermudah layanan kepada masyarakat.

f. Komunikasi

1) Komunikasi Yang Baik

Komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dimasa sekarang. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh internal pemerintahan daerah dengan menggunakan aplikasi Whatsapp grup, sedangkan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah melalui kecamatan yaitu dengan menggunakan website resmi pemerintahan daerah, kecamatan serta akun social media kecamatan.

2) Ketersediaan Informasi

Ketersediaan informasi yang diberikan sudah baik. Pemerintahan Daerah melalui kecamatan sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui offline seperti pamflet dan brosur dan online seperti website resmi kecamatan, facebook, instagram dan whatsapp grup.

3) Pengaruh Komunikasi Dalam Strategi

Komunikasi memiliki pengaruh yang cukup baik dalam perumusan strategi. Pengaruh komunikasi dapat membantu koordinasi yang baik oleh kecamatan dengan SKPD dalam memberikan bantuan yang cukup bermanfaat bagi kecamatan untuk pelayanan kepada masyarakat. pengaruh komunikasi dalam perumusan strategi memberikan dampak yang cukup baik. selain membantu pengaruh komunikasi juga memberikan dampak yang kurang baik kepada

masyarakat karena masih ditemukannya informasi hoax yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Pelaksanaan PATEN

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara internal pemerintahan maupun dengan SKPD-SKPD terkait. Serta fasilitas sarana dan prasana serta sumber daya manusia yang terpenuhi.

2) Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal yang memiliki pengaruh sangat besar dalam perumusan strategi pemerintahan daerah dalam percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah pemahaman serta dukungan dari masyarakat terkait pelayanan yang berlaku.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal dalam jalannya percepatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yaitu sumber daya manusia. Diketahui bahwa masih ditemukannya beberapa sumber daya manusia di kecamatan yang mengalami kekurangan jumlah maupun minimnya kemampuan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, adanya penggunaan anggaran yang masih belum maksimal ditujukan kepada masyarakat.

2) Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah masih ditemukan masyarakat yang belum mengerti mengenai SOP pelayanan dan pola pikir masyarakat mengenai menugurus administrasi melalui orang dalam.

3. Upaya Mengatasi Faktor - Faktor Penghambat Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Percepatan Pelaksanaan PATEN

a. Upaya Secara Langsung

Upaya langsung yang dilakukan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan percepatan yaitu dengan melakukan monitoring dan sidak langsung ke kecamatan yang memiliki dasar berupa intruksi langsung maupun surat keputusan bupati terkait pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Selain itu, pemerintahan daerah dapat berupaya langsung dengan memfasilitasi sarana prasaran serta melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

b. Upaya Secara Tidak Langsung

Upaya tidak langsung yang sudah dilakukan pemerintahan daerah adalah dengan memaksimalkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memberikan apresiasi kepada kecamatan yang telah melakukan pelayanan yang baik serta selalu melakukan koordinasi yang baik antar pemerintahan daerah dengan kecamatan.

KESIMPULAN

Strategi Pemerintahan Daerah dalam percepatan pelaksanaan PATEN di Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui kendala dikarenakan adanya sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas serta masih ditemukan masyarakat yang belum memahami mengenai PATEN.

PENGAKUAN

Penghargaan kami haturkan kepada almamater kami Institut Pemerintahan dalam Negri yang telah membantu kami sehingga penulisan artikel ini dapat di selesaikan.

REFERENSI

- Abbas, F., & Sadat, A. (2020). Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi. In *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 1, pp. 16–25).
<https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.525>
- Afrijal, & Vilzati. (2020). Analisis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Pidie Jaya Dalam Perspektif Van Peter Van Horn. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 6(1), 13–28.
<https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.598>
- Jacob, R., Mamonto, F. M., & Tangkau, C. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 33–37.
<https://doi.org/10.53682/administro.v2i1.1677>
- Junardi, J., Basri, H., & Sabirin, S. (2022). Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 32–42.
<https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.119>
- Lawelai, H. (2022). Sosialisasi Pentingnya Vaksin Covid-19 Dan Pembagian Masker Dalam Rangka Adaptasi Di Era New Normal. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(8), 1873–1880.
- Nababan, R., & Nur, A. M. (2019). Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 224–241. <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3244>
- Noraini, D. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kantor Kecamatan Parenggean. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1).
<https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2291>
- Nurrahman, A., Santoso, E. B., & Sani, M. F. (2021). Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Proses Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(2), 292–302. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i2.1401>
- Ripai, A. (2019). Penerapan Asas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 131–142.
<https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.616>

“Strategi Pemerintahan Daerah dalam Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan”

Sadat, A., Wijaya, A. A. M., Lawelai, H., Asrin, A., Nurlinda, N., Saputri, M. M., Nursalin, N., & Yanto, L. (2021). Efforts to increase public knowledge regarding the prevention of covid-19 in Baubau City. In *Community Empowerment* (Vol. 6, Issue 7, pp. 1106–1116). <https://doi.org/10.31603/ce.4904>

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.

Siregar, E. S., & Nasution, M. A. (2021). Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kota Padangsidempuan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(3). <https://doi.org/10.56015/governance.v7i3.21>